**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM SEKTOR NON FORMAL
PADA PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN MELALUI PROGRAM
KETERAMPILAN MENJAHIT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Ahmad Yani

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, FIP IKIP Mataram

E-mail: yanie034@gmail.com

Abstrak: Pemberdayaan perempuan sangat penting karena merekalah yang umumnya belum mendapatkan kesempatan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat berfungsi sebagai subyek maupun obyek dalam berbagai aspek pembangunan, baik sebagai perencana, pengambil keputusan, pelaksana, maupun mengevaluasi dan menikmati berbagai hasil pembangunan secara merata. Pada sektor non formal pemberdayaan perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang mencerminkan perempuan yang mampu meningkatkan perannya dalam lingkungan masyarakat melalui keterampilan menjahit. Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memosisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan. Perempuan akan berdaya pada saat mereka bertindak pada hal-hal yang sifatnya strategis dan bukan hanya ditujukan pada pemenuhan material, tetapi juga kelompok-kelompok sehingga dapat meningkatkan kehidupan mereka.

Kata Kunci: *Pemberdayaan perempuan, Non formal*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak kesenjangan sosial yang belum dipecahkan. Salah satunya persoalan ketimpangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan kaum perempuan adalah salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan bangsa karena kaum perempuan dengan jumlah yang sangat besar merupakan modal sosial yang potensial bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Peran perempuan Indonesia dalam sejarah pembangunan bangsa sangatlah panjang, dengan tokoh utama RA. Kartini (1879-1904) yang berjuang dalam menuntut hak kaum perempuan dan melepaskan diri dari belenggu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

Pendidikan Non Formal sebagai salah satu jalur dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peranan penting dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat

yang membutuhkan. Hal ini dijelaskan Coombs (dalam Sudjana, 2004: 22-23) pendidikan nonformal sebagai berikut:

Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya. Melalui bidang pendidikan, dapat dilakukan berbagai bentuk pelatihan pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga kecakapan, kemampuan dan keahlian masyarakat dapat meningkat. Dimulai dari lingkup yang terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga sehingga dengan mandiri masyarakat dapat menghadapi problematika hidup.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan ekonomi mikro dan kecil lokal yang ada dalam masyarakat agar komunitas

ekonomi mikro tersebut mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Agar proses perubahan dan pengembangan berjalan lancar menuju era sejahtera dan demokrasi, maka dilakukan pembentukan suatu wadah yang mandiri dan fleksibel, guna mengantisipasi semua problem sosial yang ada dimasyarakat.

Perempuan perlu diberikan suatu pelatihan, pendidikan, bahkan suatu pemberdayaan, agar mereka memiliki kemampuan untuk hidup layak dan bisa membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan salah satunya dengan mengadakan program pemberdayaan bagi narapidana wanita melalui program menjahit. Dengan adanya program tersebut diharapkan agar narapidana perempuan ini setelah keluar nanti dapat meningkatkan kemampuannya dengan cara mengembangkan potensinya serta dapat membantu perekonomiannya.

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan, dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pemidanaan, disamping itu juga diberikan pembinaan dan pembimbingan agar kembali menjadi orang baik. Pembinaan warga binaan selalu diarahkan pada resosialisasi (dimasyarakatkan kembali) dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Lembaga Pemasyarakatan perempuan yang ada, sebagai salah satu unit pelaksanaan pemasyarakatan, merupakan lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan

pembinaan narapidana sehingga penulis mengangkat permasalahan ini melalui suatu kajian kepustakaan tentang “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sektor Non Formal Pada Pembinaan Narapidana Perempuan Melalui Program Keterampilan Menjahit di lembaga pemasyarakatan)

KAJIAN TEORI

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997: 266 dalam buku “*modern social work theory*”).

Sementara itu Ife (1995: 182 dalam buku “*community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice*”) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif

pemberdayaan, diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga *non government organization/NGO* hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator.

Sementara itu, strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif sasaran atau masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari perintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat serta program pendidikan non formal. Partisipasi sasaran khususnya perempuan yang ada di lembaga masyarakatan melalui program pendidikan non formal, saat ini merupakan kunci partisipasi efektif untuk mengatasi masalah narapidana yang sedang menerima hukumannya

dengan harapan setelah selesai masa hukumannya akan menjadi bekal untuk melanjutkan kehidupannya dengan masyarakat sekitar. Dengan cara ini, para narapidana perempuan dapat memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk kehidupan berikutnya dalam lingkungan masyarakatnya.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*" dan "*empower*" menurut *Webster* dan *Oxford English Dictionary*, kata *empower* mengandung pengertian pertama adalah *to give power or authority to* yang artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan arti yang kedua adalah *to give ability to or enable* yaitu sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan yang lebih mengasentuasikan sifat-sifat "*people centered, participatory empowering sustainable*". Walaupun pengertiannya berbeda namun tetap mempunyai tujuan yang sama. yaitu untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta adanya upaya mengembangkan kearah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Konsep ini dikembangkan dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari upaya seperti "*alternative development*" yang menghendaki "*Inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and inter-generational equity*". Ini berarti perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga

yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suarni atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini dimungkinkan karena adanya persamaan gender, persamaan intergenerasi, ditingkatkannya kehidupan berdemokrasi seiring dengan perkembangan jaman.

Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan. Dengan pendekatan ini diharapkan akan lahir model-model pembangunan yang lebih partisipatif sehingga kontribusi perempuan tidak cukup hanya "ditandai" dalam bentuk uang, tenaga dan in-natura lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan.

Dalam proses pemberdayaan perempuan diperlukan perencanaan yang tersusun secara matang dan langkah selanjutnya adalah mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Pada dasarnya penerapan nilai-nilai demokrasi pada program pemberdayaan perempuan sama dengan penerapan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada intinya berupa dana (modal, sumberdaya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan).

Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar pria adalah kondisi ketika pria dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesatuan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan.

Strategi pemberdayaan dapat melalui pendekatan individual, kelompok atau kolektif dengan saling memberdayakan perempuan mitra sejajar pria dengan menggunakan pendekatan dua arah perempuandan pria yang saling menghormati sebagai manusia, saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehingga menjadi manusia mandiri tetapi tetap berkepribadian.

Pemberdayaan perempuan dapat diartikan pula sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan, sehingga dapat menyalurkan pendapatnya, mampu mengungkapkan kebutuhannya, dapat menganalisis dan turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi segala program yang berkaitan dengan dirinya.

Indikator pemberdayaan perempuan

Bagi perempuan miskin setelah melalui berbagai upaya pemberdayaan, dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai 3 indikator yaitu Indikator keluaran (*output indicator*) ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin. Indikator hasil (*income indicator*) ditandai dengan perempuan miskin yang diberdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif sesuai keterampilan mereka. Indikator dampak (*impact indicator*) ditandai dengan perempuan miskin yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha, berorganisasi/bermasyarakat dan membantu perempuan lain yang masih miskin.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tidak saja dituntut untuk memiliki keberdayaan secara ekonomi, akan tetapi tidak kalah penting memiliki keberdayaan secara sosial.

Seperti yang dikemukakan oleh Lorrancaine

Guitierrez, berdayaan ditandai dengan peningkatan kemampuan yaitu: kemampuan personal, interpersonal dan politik. Kemampuan personal adalah kemampuan individu dalam memahami kekuatan yang dimilikinya. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan individu dalam mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuatan sosialnya. Sedangkan kemampuan politik adalah kemampuan dalam mengambil keputusan bersama di dalam organisasi atau masyarakat secara formal maupun informal.

Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok narapidana lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga, narapidana perempuan.

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat

adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karenanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*Empowerment*), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Tahapan Pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu : pertama, penyiapan petugas. Yaitu tenaga pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh *community worker*, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahap Pengkajian (*Assessment*): Pada tahap ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh (*key person*), tetapi juga dapat melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah

kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan: Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap Pemformulasi Rencana Aksi: Pada tahap ini agen perubah membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan: Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah di kembangkan. Kerjasama antara petugas dan sasaran merupakan hal penting dalam tahap ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilaksanakan.
6. Tahap Evaluasi: Evaluasi sebagai proses pengawasan dari sasaran dan petugas terhadap program pemberdayaan yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak. Dengan keterlibatan tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek bisa terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat

membangun komunitas yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap Terminasi: Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin. Kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.

Strategi Pemberdayaan

Parson menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri

klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

1. Aras Mikro: Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo: Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro: Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk

memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dengan merujuk pada tujuan pemberdayaan, tahapan pemberdayaan, dan strategi pemberdayaan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas sasaran yang mengalami kerentanan sosial (seperti: masalah narapidana, kemiskinan, penyandang cacat, manula, perbedaan etnis, dan ketidakadilan gender). Upaya pemberdayaan tersebut ditujukan agar masyarakat dapat hidup sejahtera.

Adapun dalam melakukan pemberdayaan pada perempuan adalah dengan cara meningkatkan kapasitas pengetahuan dan skill perempuan agar mampu berdaya saing dan hidup mandiri. Selain itu juga perlu dilakukan pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat perempuan menjadi semakin berdaya, seperti akses pembekalan pengetahuan dan keterampilan, akses pembiayaan modal dan akses pemasaran sehingga perempuan mampu mengembangkan usahanya.

Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Kata perempuan secara etimologi berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir berkuasa, ataupun kepala, hulu atau yang paling besar: maka dikenal kata empu jari "ibu jari", empu gending orang yang mahir mencipta tembang. Kata perempuan juga berakar erat dari kata perempuan kata ini mengalami pasangan kata dari tuan. Sedangkan kata perempuan pada kamus bahasa Indonesia merupakan orang atau manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.

Pemberdayaan Perempuan

Pada dasarnya pemberdayaan perempuan menjadi penting dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Pembangunan dengan perspektif patriarkhal mengakibatkan perempuan menjadi tidak berdaya (tidak dapat mengekspresikan kebebasan yang dimilikinya).
- b. Tingkat pendidikan perempuan cenderung lebih rendah daripada laki-laki.
- c. Hak reproduksi yang cenderung dipaksakan.
- d. Ketinggalan perempuan dalam dunia politik dan sebagainya

Oleh karena itu, agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk mengadakan suatu pemberdayaan perempuan agar mereka mempunyai akses dan kontrol terhadap semua aspek pembangunan. Yang mana tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian diatas sama dengan pendapat menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dimulai dengan tidak membiarkan mereka "bodoh dan dibodohi". Dimana dalam hal ini perempuan tidak dibiarkan untuk tidak memperoleh informasi yang penting bagi dirinya mengenai kehidupan diluar sana baik tentang pertumbuhan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Oleh karena itu, agar perempuan tidak ketinggalan dalam memperoleh informasi, maka kesadaran gender perlu diperhatikan atau dipromosikan baik bagi kaum Adam maupun kaum Hawa yang paling utama.

Pada dasarnya pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk membuat setiap perempuan menjadi seorang yang mandiri yang tidak menggantungkan hidupnya pada keluarganya maupun orang lain. Mandiri, dalam kamus bahasa

Indonesia berarti tidak tergantung pada orang lain. Namun mandiri disini tidak hanya sekedar tergantung pada orang lain, tetapi juga menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang berkehendak bebas.

Pribadi yang mandiri, berani menyatakan kehendaknya, berani memutuskan, dan bertanggung jawan secara sadar yaitu bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang mampu dalam segala hal atau bidang. Akan tetapi sangat sulit bagi perempuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, sebab masyarakat selalu menghubungkan perempuan dengan ketergantungan.

\Keterampilan Menjahit

1. Pengertian Keterampilan Menjahit

Kata keterampilan berasal dari kata terampil, dengan ditambahkan awalan ke- dan akhiran menjadi keterampilan yang berarti kecakapan. Jadi keterampilan itu adalah kecakapan seseorang dalam membuat misalnya kecakapan dalam menjahit pakaian, kecakapan dalam membuat kerajinan tangan dan sebagainya. Dari hasil pekerjaannya dapat dilihat : Kerapihannya, penyelesaiannya cepat atau tidak, teliti atau tidak, bagaimana halus kasarnya pekerjaan dan sebagainya.

Menurut Ngalim Purwanto, keterampilan berasal dari kata terampil yang bearti mahir, namun dalam pembahasan ini keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan tangan atau kecekatan kerja. Sedangkan Whitherington menyatakan bahwa suatu keterampilan adalah hasil dari latihan yang berulang-ulang yang dapat disebut perubahan meningkat atau progresif atau pertumbuhan yang di alami oleh orang yang mempelajari keterampilan tadi sebagai hasil dari aktivitas tertentu. Jadi, keterampilan

adalah serangkaian latihan terencana dan terarah yang diberikan oleh instruktur. Selain itu keterampilan bergerak dari hal yang teramat sederhana sampai hal yang sangat kompleks.

Keterampilan menurut Mace dikutip oleh Ivor. K. Davies adalah kemampuan untuk menghasilkan secara konsisten suatu akibat yang diharapkan dengan ketepatan, kecepatan, dan penghematan tindakan. Keterampilan menjahit dalam arti yang luas bukan hanya sekedar pelajaran jahit menjahit saja, tetapi meliputi pengetahuan tentang kesehatan, keserasian, dan perawatan dalam berpakaian. Seperti apa yang diungkapkan oleh Moersarah Mangkoesatyoko, dalam bukunya yang berjudul PKK, bahwa keterampilan menjahit adalah pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan dan tata rias diri, memahami peraturan kesehatan untuk mencapai keindahan diri, memiliki keterampilan untuk merawat dan memperindah diri serta memiliki apresiasi terhadap penampilan diri yang menarik.

Dari penjelasan diatas, keterampilan dapat di artikan bahwa keterampilan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan secara konsisten dengan ketepatan dan kecepatan tertentu serta hemat waktu dalam melakukan tindakan.

2. Macam-Macam Keterampilan

Keterampilan kerajinan tangan sangat banyak jenisnya, ada yang khusus untuk pria dan ada yang khusus wanita. Jenis pekerjaan tangan yang dikhususkan untuk pria seperti bengkel, mengukir, menenun, membentuk rotan, dan seni cetak sablon. Sedangkan jenis pekerjaan tangan yang dikhususkan untuk wanita seperti melipat, menjahit, meronce,

merangkai bunga, memasak, membatik dan merenda.

Jenis pekerjaan tangan untuk pria dan wanita dibedakan karena kemampuan taktil yang berbeda, pekerjaan tangan untuk pria membutuhkan tangan dan teknik, sedangkan pekerjaan tangan untuk wanita membutuhkan motorik halus dan kesabaran. Adapun macam-macam keterampilan meliputi :

- a. Keterampilan rekayasa meliputi: 1). Keterampilan anyaman, 2). Keterampilan sablon, 3). Keterampilan tenun, 4). Keterampilan menjahit, 5). Keterampilan membuat bata.
- b. Keterampilan jasa dan pekantoran meliputi : 1). Koperasi, 2). Komputer
- c. Keterampilan pertanian meliputi: Tanaman hias.
- d. Keterampilan seni dan kerajinan meliputi : 1). Ukir kayu, 2). Batik cap.

3. Tujuan Belajar Keterampilan

Berdasarkan kurikulum KopWan Wira Usaha Bina Sejahtera diadakannya pelatihan keterampilan ini antara lain :

- a. Untuk mensejahterakan kehidupan peserta keterampilan menjahit dan dapat meningkatkan ekonomi mereka.
- b. Untuk membantu peserta dengan keterampilan atau keahlian hidup sehingga dapat menjadi modal dasar untuk membuka usaha. Diharapkan dengan keterampilan yang telah didapat para peserta dari pelatihan ini, maka secara otomatis peserta dapat memanfaatkan kemampuannya untuk berusaha dalam rangka meningkatkan ekonomi mereka menuju pada pemenuhan kesejahteraannya.

Selain itu tujuan yang hendak dicapai dalam meningkatkan ekonomi peserta antara lain, meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta,

tujuan ini agar bagaimana peserta keterampilan menjahit ini di upayakan memiliki keterampilan hidup untuk menjadi lebih produktif. Bentuk upaya ini dilakukan dengan cara pelatihan keterampilan selanjutnya setelah pelatihan keterampilan tersebut, maka para peserta akan memiliki keterampilan yang dapat mereka pergunakan untuk melakukan usaha yang menghasilkan. Ada juga tujuan yang lain yaitu untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, ini bertujuan agar peserta siap dengan keterampilannya yang akan digunakan dalam dunia kerja yang akan digelutinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, menurut Nazir (2003: 111) mengemukakan bahwa "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan." Peneliti melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan.

Sumber-sumber kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari: buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi). Sehingga dalam penelitian ini meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kebutuhan yang sangat mendorong usaha pembangunan adalah memperbaiki kehidupan rakyat tanpa perbedaan, dalam arti meningkatkan

kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat tersebut maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat yang termarjinalkan, kurang berpotensi, baik itu laki-laki maupun perempuan utamanya masyarakat sedang menjalani masa hukumannya, pengangguran atau yang tidak memiliki pekerjaan.

Banyaknya motivasi perempuan melakukan usaha karena ingin mengurangi beban keluarganya atau menciptakan lapangan usaha, menunjukkan adanya kesadaran dari perempuan atas kondisi kebutuhan yang semakin meningkat, adanya kesadaran dari wanita untuk menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan. Secara umum masih sedikit diantara kita yang menyadari bahwa perempuan menghadapi persoalan yang spesifik gender, yaitu persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau kelompok orang adalah perempuan.

Hal ini terjadi karena mendalamnya penanaman nilai-nilai mengenai peran laki-laki dan perempuan, yang menganggap sudah kodratnya perempuan sebagai ratu rumah tangga, sebagai pengendali urusan domestik saja begitu dominan di masyarakat kita, sehingga adanya pikiran dan keinginan mengenai kesempatan beraktivitas di luar domain rumah tangga dianggap sesuatu yang mengada-ada terlebih para perempuan yang tersangkut dengan masalah hukum yang membelitnya, sehingga tidak aneh muncul paradigma perempuan tidak hanya akan mengurus sekitar kasur, sumur, dan dapur.

Sehubungan dengan pemberdayaan perempuan, sebenarnya pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup serius di berbagai lembaga terlebih dalam sektor pendidikan non formal dan usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang

menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat perempuan, terutama kelompok perempuan yang banyak berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga, baik pada narapidana perempuan, bekerja sendiri atau sebagai pekerja keluarga.

Wanita potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Dengan potensi tersebut wanita potensial berperan aktif dalam proses recovery ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan, untuk itu potensi perempuan perlu ditingkatkan atau paling tidak dikurangi penyebab-penyebab mengapa perempuan sulit maju dalam karier bagi perempuan bekerja dan sulit maju usahanya bagi perempuan pelaku usaha. Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah tidak terjangkau oleh sistem pendidikan persekolahan dan kurang berkembangnya kegiatan pendidikan luar sekolah yang ada diantara mereka. Oleh karena itu sangat didambakan akan kehadiran program-program pendidikan luar sekolah yang berbasis sosial budaya dan potensi alam sekitarnya untuk memberdayakan perempuan.

Tugas pendidikan nonformal adalah membantu meningkatkan kualitas dan martabat manusia sebagai individu dan warga negara yang dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri harus dapat mengendalikan perubahan dan kemajuan. Oleh karena itu wajarlah bila perhatian terhadap pendidikan nonformal semakin besar. Fungsi dan tujuan utama pendidikan nonformal adalah memberikan pendidikan dalam jangka waktu yang sangat singkat yang berorientasi pada bidang keterampilan

khusus yang dikemas dalam bentuk paket-paket berdasarkan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang, yang mana isi programnya bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pembinaan terhadap narapidana perempuan tampak memfokuskan pada pembinaan keterampilan, dengan tanpa mengesampingkan pembinaan lain karena pada dasarnya semua pembinaan adalah penting. Namun karena materi pembinaan keterampilan mempunyai intensitas yang cukup tinggi, jadi terkesan bahwa pembinaan keterampilanlah yang difokuskan. Berbagai jenis keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri yang diberikan kepada narapidana perempuan meliputi kerajinan tangan seperti kristik, sulam, smook, renda, menjahit dan kursus menjahit, bordir serta salon.

Disini narapidana dapat mengembangkan bakat yang mereka punya khususnya bakat menjahit dan salon. Narapidana dapat mengembangkan dan dapat mempergunakan fasilitas yang diberikan melalui menjahit dan salon, melalui ketrampilan menjahit narapidana dapat menghasilkan karya-karya menjahitnya yang bisa mendukung usaha-usaha mandiri sedangkan melalui salon narapidana bisa melayani narapidana lain yang ingin menggunakan fasilitas salon untuk kepentingan atau mempercantik pribadi narapidana itu sendiri mulai dari potong rambut, creambath, lulur. Dalam keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil disini narapidana dilibatkan dalam kegiatan seperti membuat kue dan memasak, mereka bisa mandiri sendiri dengan membuat kue dan memasak makanan sesuai bakat yang mereka miliki.

Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan Lapas

perempuan memberikan pembinaan yang berkualitas bagi para narapidaria perempuan. Harapannya adalah mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah ditemainya dalam kehidupan setelah mereka keluar dari lapas yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya.

SIMPULAN

Persoalan perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor ideologi, struktural dan kultural, ketiganya saling terkait menguatkan suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan perempuan. Ideologi patriaki yang bergandengan dengan ideologi gender telah merasuki struktur dan sistem sosio kultural masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi pinggiran, peran dan status perempuan yang bersifat sekunder.

Program yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dalam pemberian keterampilan menjahit adalah upaya pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan potensi sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan diharapkan dari hasil keterampilan menjahit ini bisa menjadi modal untuk mereka agar dapat membuka usaha sendiri sehingga para perempuan bisa memberdayakan diri sendiri juga dapat membantu perekonomian keluarganya. Melalui pembinaan kemandirian inilah narapidana dapat menyalurkan ketrampilan-ketrampilan mereka, diharapkan narapidana harus bisa mandiri dengan mewujudkan ketrampilan-ketrampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki yang bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat.

Tujuan di selenggarakannya pemberdayaan adalah untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki narapidana, untuk melatih perempuan agar dapat hidup mandiri, serta pada akhirnya dapat membantu dirinya untuk meningkatkan taraf hidupnya setelah keluar dari masa hukumannya .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Agus Syafi'i. 2001. *Manajemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru
- Artmanda. W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media).
- Ari Sunarijati,dkk. 2000. *Perempuan yang Menuntun* :Sebuah Perjalanan Inspirasi dan Kreasi. Bandung: Ashoka Indonesia
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Adi, Isbandi, Rukminto. 2003. *Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Edi suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama
- Ngalim, Purwanto. 1986. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktikum . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moersarah, Mangkoesatyoko. 1975. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 1 Jakarta: F.A. Hasmar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Soetrisno, Lukman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*. Yogyakarta, Kanisius

Titik Sumarti. 2010. "Strategi Nafkah Rumah Tangga dan Posisi Kaum Perempuan" dalam

Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian), Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.